

BIBLIOGRAPHY

- Brown, Gillian and George Yule. 1983. *Discourse Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dijk, Teun A. Van. 1993. *Discourse as Social Interaction: Discourse Studies, A Multidisciplinary Introduction Volume 2*. Trowbridge: The Cromwell Press.
- Eco, Umberto. 1984. *Semiotics and The Philosophy of Language*. London: Mc. Millan
- Halliday, M.A.K and Ruqaiya. 1982. *Bahasa, Konteks dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa dalam pandangan Semiotik Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hornby, A.S and Christina Ruse. 1988. *Oxford Student's Dictionary of Current English*. Oxford : Oxford University Press.
- Lailiyah, Nurul. 1998. *Analisis Wacana Kampanye PPP dalam Kampanye Pemilu 1997 di Surabaya*.
- Mc. Quail, Denis. 1994. *Mass Communication Theory*. London: Cromwell Press Ltd.
- Palmers, Fr. 1995. *Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Panuju, Redi. 1997. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Indonesia.
- Pattinassarany, Sally. 1996. *Dasar-Dasar Semiotik (Elemente der Semiotik)*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa departemen Pendidikan dan Budaya.
- Rochman, Aunur. 1997. *Konflik PDI Dalam Kartun Clekit Studi Semiotik-Penggambaran Konflik*.
- Santoso, Tjatur Budi. 1998. *Wacana Penulis Laki-Laki Tentang Gerakan Perempuan di Indonesia*.

Zoest, Van Aart. 1993. *Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa Yang Kita Lakukan Dengannya*, in Ani Soekawati: Jakarta: Yayasan Sumber Agung.

The Documentary Sources:

1. Oposisi, 26th June - 2nd July 2000
2. Oposisi, 11th July - 17th July 2000
3. Oposisi, 17th July - 23rd July 2000
4. Oposisi, 24th July - 30th July 2000
5. Oposisi, 31st July - 6th August 2000
6. Oposisi, 7th August - 13th August 2000
7. <http://www.oposisigroup.com>

APPENDIX

Manuver Politik Amien Rais

Arah mata angin politik mulai bergeser. Ketua MPR-RI Amien Rais yang biasanya garang mengkritisi sohibnya, Presiden Abdurrahman Wahid, belakangan mulai surut. Malahan, dengan mimik suntuk, tokoh reformis ini mengaku tidak tertarik lagi obral kritik. Jewer-jewer dengan Gus Dur yang kerap menjadi polemik, sepekan terakhir ini mulai reda.

kelompok Fuad Bawazier waktu itu orang-orang dekat Gus Dur hanya meyakini dengan sabar. Katanya, "Biarlah segudang manuver digalang musuh-musuh Gus Dur. Tapi pada saatnya nanti, akan kehabisan energi sendiri."

Ditinggalkan Teman
Rupanya, apa yang dikatakan orang-orang dekat Gus Dur itu benar adanya. Belakangan ini, tidak hanya lawan-lawan politik Amien Rais yang menggugat manuver politiknya. Namun, juga kaukusya sendiri, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mulai berpaling kembali kepada Gus Dur

Menurut sumber OPOSISI di Partai Golkar, Hamzah Haz mulai tidak sejalan lagi dengan pilihan politik Amien Rais. PPP menilai, manuver politik Amien yang begitu blak-blakan, lurus dan selalu menyerang Gus Dur itu dianggap tidak strategis. Selain itu, PPP juga merasa dikelabui Amien dan Poros Tengah. Ada catatan bagi PPP, bahwa Amien Rais sesekali menelikung Hamzah Haz. Misalnya dalam kasus pemilihan gubernur di Sumatera.

Hamzah Haz juga merasa tidak mendapat pembelaan yang jelas dari kaukus Poros Tengah, ketika dicopot oleh Gus Dur dari jabatan menteri beberapa waktu lalu.

Karena itu, ada kalkulasi praktis dari PPP, bahwa mengikuti langkah Amien Rais tidak selalu menguntungkan. Itulah pilihan politik PPP dalam mengubah strategi. Makanya, jangan terlalu heran, kalau Hamzah Haz dan sejumlah tokoh PPP mulai lunak terhadap Gus Dur. Sikap kooperatif Hamzah kepada Gus Dur ini begitu nyata dari hari ke hari. Dalam momen *istighotsah* yang diselenggarakan di kantor PB NU beberapa waktu lalu, bisa menjadi rentetan bukti.

Ketua Umum PPP Hamzah Haz, mantan Sekjen PPP Tosari Widjaya juga tampak hadir dalam acara rutin yang digalang Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi. "Tumben, Pak Hamzah dan Pak Tosari datang," kata seseorang di kantor PB NU pada OPOSISI.

Masih soal kooperatif Hamzah Haz kepada Gus Dur, bisa diingat dari kunjungan Hamzah ke Istana beberapa pekan lalu, yang meminta jatah menteri kepada Gus Dur kalau *reshuffle* kabinet benar adanya. Maka itu, kata sumber OPOSISI, Hamzah Haz mulai pasang badan untuk menyongsong *reshuffle* kabinet nanti. "Nampaknya, PPP rela pisah dari kaukus Amien kalau Gus Dur memberi jatah kursi menteri bagi kadernya."



Masih menurut sumber Golkar itu, begitupun Akbar Tandjung, sekarang juga sudah mulai tidak sreg lagi dengan manuver yang dimalinkan Amien Rais. Konon, Akbar merasa risih melihat manuver terakhir Amien Rais yang menumpang usulan Agung Laksono soal tim kesehatan independen Presiden Gus Dur. Dalam kaca mata Akbar, pernyataan Amien yang mengamini usulan Agung itu sudah benar-benar fulgar. Selain itu tersebut dinilai tidak begitu urgen, usulan tim kesehatan presiden dianggap terlalu mengada-ada. "Kalau memang itu yang disoal, kok tidak dulu-dulu," kata sumber itu.

Padahal, usulan yang disampaikan Agung Laksono itu menurut Wakil Sekjen Partai Golkar Muchyar Yara, sama sekali bukan rekomendasi resmi Partai Golkar. Golkar merasa tidak pernah membuat usulan yang menuntut tim medis independen Presiden Gus Dur. Akbar juga menilai, sikap Agung Laksono itu di luar tanggung jawabnya. "Partai Golkar tidak pernah menyampaikan usul itu," kata Akbar.

Lantas, siapa yang menumpang isu pembentukan tim medis independen Gus Dur itu? Menurut Muchyar, di belakang Agung Laksono adalah sayap Golkar kaukus Iramasuka Nusantara. Selain itu, juga ada menumpang para loyalis rezim Habibie. Muchyar malah mengatakan, ia mendengar

abar kalau isu tim kesehatan Independen Gus Dur itu sebelumnya telah digagas di kalangan tokoh pengikut Habibie. "Barang kali Amien Rais tidak ngerti. Atau sengaja numpang," tambah aktivis Golkar yang sering beda pendapat dengan Akbar Tandjung ini.

Karena langkah Amien yang dianggap kontraproduktif itulah, membuat Akbar Tandjung mengubah haluan. Ia bersama gerbong Golkar yang lain mulai meninggalkan kebiasaan Amien Rais yang menghantam siapa saja itu. Ada istilah yang pas untuk dikatakan, bahwa Akbar Tandjung mulai menyali di tikungan. Langkah-langkahnya mulai ditempuh bersama gengnya sendiri, dan tidak lagi minta pertimbangan dari Amien Rais.

Bukti langkah diamnya Akbar untuk meninggalkan Amien Rais bisa dilihat dari kunjungannya kepada Gus Dur menjelang waktu presiden ke luar negeri beberapa waktu lalu. Akbar bersama Ketua Umum PDI-P Megawati dan Ketua Umum PKB Matori Abdul Djali diam-diam bertemu Gus Dur.

Menurut pengakuan Gus Dur, pertemuan dengan tiga pimpinan partai besar itu sengaja dilakukan untuk membahas format *reshuffle* kabinet yang akan datang. Gus Dur malah dengan tegas mengatakan, setelah pertemuannya dengan tiga tokoh itu, dirinya mengaku dapat dukungan penuh untuk

melakukan *reshuffle*. Sebuah pertemuan janggal, karena promotor Poros Tengah, Amien Rais yang biasanya dilibatkan Gus Dur, ditinggal.

Yang lebih gres, *moment* silaturahmi Akbar Tandjung dengan sejumlah kiai khos di Pondok Al Hikam Malang milik Hasyim Muzadi. Akbar, sengaja diusung aktivis Golkar Ridwan Hisyam dan Yahya Zaini untuk bertemu dengan para kiai NU itu. Sebelum kedatangan Akbar, Megawati melakukan pertemuan serupa dengan perantara Syaifulloh Yusuf. Kedua penghubung ini masing-masing aktivis Golkar dan NU yang wama politiknya lebih kental dengan HMI.

Serangkaian pertemuan itulah yang membuat kesan Amien Rais mulai ditinggalkan teman-temannya. Namun demikian, ketika ditanya OPOSISI, Amien Rais merasa tidak pernah ditinggal oleh siapapun. Ia mengaku punya cara dan agenda sendiri untuk membangun bangsa ini. Menurutnya, semua orang boleh menentukan sikapnya untuk membangun bangsa ini. Menurutnya, semua orang boleh menentukan sikapnya bangsa yang lebih besar. "Siapa yang meninggalkan saya?" tanya Amien.

Gus Dur Harus Dirkritik

Menjawab tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Amien Rais, para pendukungnya tidak kalah lantang bersuara. Mereka menganggap apa yang dilakukan Amien Rais selama ini adalah hal yang wajar. Menurut mereka, tidak ada yang keras dari pernyataan-pernyataan Amien Rais. "Kita harus memisahkan yang mana yang kasar dan mana yang tegas," tandas Samuel Koto dari Fraksi Reformasi. Apa yang dilakukan Amien Rais katanya, masih dalam kerangka tindakan tegas yang mengarah pada agenda Reformasi. "Kalau sampai saat ini belum ada agenda reformasi yang dilakukan Gus Dur, memang siapapun harus teriak."

Ia mencontohkan, masih maraknya kasus korupsi. Dalam persoalan korupsi, Gus Dur tidak sekadar terlambat menanganinya. Tapi justru muncul korupsi baru dengan gaya lama. Misalnya kasus *Buloggate*, *Bruneigate*, *Bligate*, kasus penempatan orang-orang Gus Dur di BUMN, BPPN, dan tempat basah lainnya.

Menurut Samuel, masalah tes kesehatan yang dianggap orang sebagai ambis fulgar Amien Rais itu sebetulnya bukan murni pikiran Amien. Amien Rais hanya dimintai komentar. Dan komentar yang diberikan berdasarkan etika moral yang wajar. "Memang repot, dulu ketika Pak Amien, ngotot mencalonkan Gus Dur sebagai presiden, juga ditentang. Dan setelah benar-benar jadi presiden, kemudian dikritik, juga dikurigi," tandas Samuel. OPOSISI di kalangan Partai

116 Kroni Soeharto Bakal Ditangkap

Genderang perang antarelite politik mulai ditabuh. Mereka saling bermanuver, saling balas, dan saling membocorkan data-data kebobrokan masing-masing lawan politiknya. Meraka tak sadar bahwa perseteruannya hanya terjebak pada pola permalnan lama, kroni Soeharto. Masih dalam ingatan segar kita, bom meledak di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, juga diluncurkannya rumor penangkapan 40 politisi kritis, dan data yang paling mutakhir, bakal ditangkap 116 kroni Soeharto. Lantas, siapa biang kerok di balik semua ini?



TERNYATA pihak Kejaksaan Agung mengakui, telah mengirim 116 nama kepada Sekretaris Jenderal DPR/MPR untuk diklasifikasi. Apakah di antara nama-nama tersebut ada yang menjadi anggota DPR/MPR, khususnya yang disebut sebagai Presiden Abdurrahman Wahid sebagai biang kerok.

Hasil investigasi OPOSISI di kalangan DPR/MPR, akhirnya menemukan data konkrit dari pihak Kejaksaan Agung. Yakni, sekitar 116 nama yang diduga terlibat KKN semasa pemerintahan Soeharto. Benar-tidaknya data tersebut, yang jelas, pihak Kejaksaan Agung sudah berkitir surat kepada Sekjen DPR/MPR untuk melakukan klarifikasi nama-nama yang menjadi target pemeriksaan.

Dari deretan 116 daftar nama, alamat, dan jabatan ketika era Soeharto itu, cuma dua anggota MPR yang masuk dalam *draft* target pemeriksaan. Dua anggota MPR tadi adalah Fuad Bawazier dan Siswono Yudho Husodo - yang masing-masing sebagai Utusan Daerah Yogyakarta dan Utusan Golongan Petani (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).

Bagaimana dengan 114 nama lainnya? Memang, pengantar surat yang di pojok kanan tertera "sangat rahasia" itu merupakan nama-nama dari ke-116 orang yang akan segera diperiksa sebagai saksi sejumlah kasus yang berkaitan dengan KKN Soeharto, termasuk

dua nama Fuad Bawazier dan Siswono Yudho Husodo. "Jadi, tak ada kaitannya dengan aktivis politik," kata Yushar Yahya, Kapuspenkum Kejagung kepada OPOSISI, akhir pekan lalu.

Yushar membenarkan, pihak Kejaksaan telah mengirimkan surat kepada institusi DPR/MPR yang dialamatkan pada Sekjen DPR/MPR. Surat tersebut dikirim sekitar bulan Juni, berisi permintaan penjelasan pada DPR apakah dari sejumlah nama yang diajukan pihak Kejaksaan Agung ada yang menjadi anggota DPR/MPR.

Namun, Yushar menegaskan kembali, bahwa sejumlah nama yang ditanyakan kepada DPR/MPR itu sudah jelas keterkaitannya. Sebagian besar terkait kasus KKN Soeharto, kasus Bank Bali, dan ada juga yang terkait kasus pelanggaran HAM. Hanya saja, Yushar enggan merincikan nama-nama siapa saja yang terkait dengan masing-masing kasus tersebut. Termasuk siapa saja yang terkait dengan kasus pelanggaran HAM.

Belakangan ini santer disebut-sebut nama Fuad Bawazier ada di balik kegiatan ilegal. Ada yang menyebut, terlibat kasus pengendalian massa untuk mendemo Gus Dur. Ada juga yang menuding mantan Menteri Keuangan era Soeharto ini terlibat pengiriman ribuan pasukan Jihad ke Ambon. Tapi benarkah gara-gara kegiatan-nya yang dinilai pemerintah mencurigakan — itu membal namanya masuk daftar target operasi Kejaksaan Agung?

Fuad sendiri menjelaskan, bahwa namanya disebut-sebut akan diperiksa Kejaksaan karena terkait dengan kasus dugaan KKN Soeharto dan bukan karena aktivitas politiknya. Intinya keterlibatannya dalam Yayasan Dana Sejahtera Masjid (YDSM). Bahkan Fuad mengaku, dalam kasus itu dirinya sudah diperiksa dua kali oleh Kejaksaan Agung. Ia diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi. Demikian pula Siswono, pernah diperiksa sebagai saksi, jauh hari sebelum dirinya menjadi wakil petani di MPR periode 1999-2004.

Dua Surat Rahasia Lantas bagaimana dengan isu puluhan anggota DPR/MPR yang telah masuk daftar penangkapan? Misalnya selain dua nama Fuad Bawazier dan Siswono, ada lagi nama-nama seperti Ade Komaruddin, Hatta Radjasa, Alvin Lie, Giandjar Kartasasmita, Zulvan LINDAN, Heri Ahmadi, dan Arifin Panigoro. Nah, nama-nama ini barangkali masuk dalam daftar penangkapan yang sengaja dibuat lawan

politik Gus Dur, agar kewilayahan presiden hancur. Semula beredar 40 tokoh politik bersuara keras yang akan ditangkap, kemudian nama-nama itu berkembang menjadi 60 orang.

Sejauh ini memang belum ditemukan data autentik yang memuat daftar nama politisi yang akan ditangkap Kejaksaan Agung, terutama yang ada di luar 116 nama-nama itu. Sumber OPOSISI di Sekjen MPR menjelaskan, bahwa ada dua surat dari Kejaksaan Agung yang dikirim berbeda. Ada yang tertanggal 22 Juni 2000, yang berisi 116 orang terkait kasus KKN Soeharto. Kemudian, disusul surat berikutnya tertanggal 25 Juni 2000 yang berisi permintaan penjelasan apakah nama Hayono Isman (mantan Menpora era Soeharto) adalah anggota DPR/MPR? Kedua surat rahasia itu masing-masing ditandatangani Jampidsus Kejaksaan Agung, Ramelan SH.

Menurut sumber OPOSISI lainnya di Sekjen MPR, sejauh ini pihaknya belum menerima surat yang lain selain dua surat di atas. Kalau toh ada surat lagi yang menyebut nama-nama anggota DPR, mungkin jatuhnya ke Sekjen DPR, bukan

kejaksaan Agung menyangkut isu santer soal penangkapan dirinya.

Hanya saja, lanjut Ade, ia memang pernah menengkar kalau dirinya disebut-sebut masuk daftar target penangkapan. Tapi Ade balik menantang. Kalau memang pihak Kejaksaan Agung menemukan bukti-bukti pelanggaran pidana maupun yang lain, boleh saja menangkap dirinya. Sebab, pihaknya sejauh ini tidak punya kebalahan apa-apa. Sehingga ancaman Kejaksaan Agung untuk menangkap dirinya itu mengada-ada. "Saya dengar, Marzuki Danusman tengah mencari-cari kesalahan saya," kata Ade yang sering dijuluki aktor hak interupsi DPR ini.

Demikian juga anggota DPR dari Fraksi Reformasi Alvin Lie. Menurut pengakuannya, dia mendengar namanya juga menjadi target sasaran penangkapan. Tapi sejauh ini belum juga menerima surat penangkapan itu. Pengerak hak anket kasus *Bulogate* dan *Brunogate* ini tidak habis pikir, atas dasar apa dirinya mau ditangkap.

Tapi, Alvin sendiri menduga-duga, barangkali ancaman penangkapan itu berkaitan dengan aktivitas

politiknya sebagai anggota dewan. Apalagi, dirinya begitu getol mengejar dugaan penyimpangan yang dilakukan Presiden Gus Dur terhadap kasus *Brunogate* dan *Bulogate*. Tapi Alvin balik bertanya, kalau gara-gara itu lantas dirinya mau ditangkap, berarti pemerintah telah membunuh institusi parlemen. Padahal, fungsi parlemen adalah untuk melakukan kritik, kontrol, dan secara tegas mengingatkan presiden kalau memang dinilai menyimpang dari GBHN.

Indikasi pemanggilan anggota DPR di luar daftar 116 nama yang sudah dikirim ke Sekjen MPR itu semakin kuat tatkala Kapuspenkum Kejaksaan Agung mengakui akan segera ada pemanggilan para anggota dewan tersebut. Malah ia mengatakan, diperkirakan pekan ini sudah ada yang mulai dipanggil sebagai saksi. Hanya saja, Yushar lagi-lagi menampik kalau sejumlah anggota dewan itu akan diperiksa karena terkait dengan aktivitas politiknya. Namun, karena terkait kasus KKN Soeharto, kasus Bank Bali dan kasus HAM. "Apa yang menjadi kewenangan Kejaksaan Agung adalah menangani kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan HAM. Sementara untuk kasus di luar itu menjadi kewenangan Polri," cetus Yushar Yahya.

Apa yang dilansir pihak Kejaksaan Agung itu sekaligus memperkuat pernyataan yang disampaikan Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak. Kata Marsilam, dalam jumpa pers di Istana Negara, biang keroknya memang di DPR, jumlahnya kurang dari 10 orang. Namun, keesokan harinya, pernyataan Marsilam dibantah Presiden Abdurrahman Wahid.

Dua Versi Lantas bagaimana skenario pemunculan isu penangkapan 116 nama yang terkait KKN Soeharto? Rupanya, ada dua versi. Versi pertama, bahwa data yang mencantumkan 116 nama itu terkait kasus

politiknya sebagai anggota dewan. Apalagi, dirinya begitu getol mengejar dugaan penyimpangan yang dilakukan Presiden Gus Dur terhadap kasus *Brunogate* dan *Bulogate*. Tapi Alvin balik bertanya, kalau gara-gara itu lantas dirinya mau ditangkap, berarti pemerintah telah membunuh institusi parlemen. Padahal, fungsi parlemen adalah untuk melakukan kritik, kontrol, dan secara tegas mengingatkan presiden kalau memang dinilai menyimpang dari GBHN.

Indikasi pemanggilan anggota DPR di luar daftar 116 nama yang sudah dikirim ke Sekjen MPR itu semakin kuat tatkala Kapuspenkum Kejaksaan Agung mengakui akan segera ada pemanggilan para anggota dewan tersebut. Malah ia mengatakan, diperkirakan pekan ini sudah ada yang mulai dipanggil sebagai saksi. Hanya saja, Yushar lagi-lagi menampik kalau sejumlah anggota dewan itu akan diperiksa karena terkait dengan aktivitas politiknya. Namun, karena terkait kasus KKN Soeharto, kasus Bank Bali dan kasus HAM. "Apa yang menjadi kewenangan Kejaksaan Agung adalah menangani kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan HAM. Sementara untuk kasus di luar itu menjadi kewenangan Polri," cetus Yushar Yahya.

Demikian juga anggota DPR dari Fraksi Reformasi Alvin Lie. Menurut pengakuannya, dia mendengar namanya juga menjadi target sasaran penangkapan. Tapi sejauh ini belum juga menerima surat penangkapan itu. Pengerak hak anket kasus *Bulogate* dan *Brunogate* ini tidak habis pikir, atas dasar apa dirinya mau ditangkap.

Tapi, Alvin sendiri menduga-duga, barangkali ancaman penangkapan itu berkaitan dengan aktivitas politiknya sebagai anggota dewan. Apalagi, dirinya begitu getol mengejar dugaan penyimpangan yang dilakukan Presiden Gus Dur terhadap kasus *Brunogate* dan *Bulogate*. Tapi Alvin balik bertanya, kalau gara-gara itu lantas dirinya mau ditangkap, berarti pemerintah telah membunuh institusi parlemen. Padahal, fungsi parlemen adalah untuk melakukan kritik, kontrol, dan secara tegas mengingatkan presiden kalau memang dinilai menyimpang dari GBHN.

Dua Versi Lantas bagaimana skenario pemunculan isu penangkapan 116 nama yang terkait KKN Soeharto? Rupanya, ada dua versi. Versi pertama, bahwa data yang mencantumkan 116 nama itu terkait kasus

Gus Dur - Amien kok Mau-maunya Diadu Domba

Kalau tidak ada aral, pada bulan Agustus nanti rakyat Indonesia punya gawe 'ulang tahun' Sidang Umum Tahunan MPR. Sidang Umum Tahunan yang baru digelar untuk kali pertama selama Indonesia merdeka. Bahkan, untuk monandal setahun (10 bulan) Presiden Gus Dur berkuasa, ia dihadiahi berupa interpelasi dan hak angket.

SAYANG memang, belum genap satu tahun, Gus Dur kerap 'menjual bantal' hujatan lawan politiknya. Dan, yang paling seru ketika Amien Rais yang akan memegang palu pada Sidang Tahunan nanti, justru melakukan rival dengan mengkritisi sepak terjang sang kiai presiden itu, selama delapan bulan ini. Karuan, dua tokoh dari organisasi Islam terbesar di negeri, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini hubungannya sudah tak mesra lagi seperti ketika Amien Rais mempopulerkan Poros Tengah dengan mencalonkan Gus Dur sebagai kandidat alternatif calon presiden.

Dulu, taklaka dua tokoh tersebut berseberangan, tak banyak yang menggubris. Karena, keduanya masih berada di pinggiran kekuasaan. Tapi, sekarang? Gus Dur sebagai presiden, dan Amien Rais sebagai Ketua MPR-RI. Konflik keduanya punya dampak luar biasa di kalangan *grass roots* masing-masing ormas Islam itu. "Kalau elite-nya omongannya tegang, bisa jadi di lapisan masyarakat bawah semakin tegang," tutur Azyumardi Azra.

Maka merembaklah spekulasi bahwa perseteruan Gus Dur - Amien Rais memang ada yang mengipas-ngipasi. Bisik-bisik pun pada bermunculan. Gus Dur dan Amien Rais seperti diadu untuk berantem. Entah, mereka sadar atau tidak, terutama orang-orang di sekitar ring satu. Bisa jadi, keduanya memang terjebak permainan oknum yang tak ingin Gus Dur - Amien tampak rukun," ucap sumber OPOSISI yang enggan

disebut jati dirinya.

Misi Jesuit Lalu pihak mana yang sengaja mengipas-ngipasi seteru kedua tokoh Islam ini?

Sejumlah tokoh Islam seperti Ahmad Soemargono dan Abdul Qadir Djaelani menduga dilakukan oleh aktivis nonmuslim. Aktivis ini dalam istilah populer mereka disebut kaum penginjil atau kelompok Ordo Jesuit. Munculnya nama ini sebetulnya sudah bukan hal baru. Sejak orde kekuasaan Soeharto, kalangan Islam seperti KISDI, FPI (Front Pembela Islam) sudah mencurigai gerilya Ordo ini. Bahkan sepanjang sejarah Orde Baru, ~~kena~~ sekali nuansa keterlibatan Ordo ini dalam skenario pemojokan Islam oleh penguasa (baca Islam phobia).

Siapa lagi kalau bukan Beny Moedani dan almarhum Ali Moertopo yang sering disebut-sebut sebagai desainer Islam Phobia. "Theo Sjaffe itu penginjil redikal yang menunggangi kekuasaan Orde Baru untuk mendiskreditkan Islam," kenang Ahmad Sumargono, ketua KISDI kepada OPOSISI, pekan lalu. Bukan tidak mungkin misi Jesuit sengaja menggoyang kekuatan Islam, bahkan membenturkan tokoh-tokohnya. Pertarungan antara Gus Dur-Amien Rais, Gus Dur-Akbar Tandjung atau Megawati-Gus Dur mungkin menjadi satu perangkap misi adu domba sesama pemimpin Islam di Indonesia ini, tambahnya.

Tujuannya, untuk mengaduk-aduk kekuatan Islam agar tak se-



makin kukuh di negeri ini. "Itu target akhirnya. Tapi, target antaranya yang membuat kekacauan antara pemimpin Islam ini," tandas Sumargono, yang juga Ketua Fraksi PBB itu.

Demikian pula pengamatan Azyumardi Azra, rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. "Menurutnya, memang umat muslim ini menyimpan potensi konflik di internal mereka sendiri. Secara alam, ormas Islam yang beragam dari sisi cara dan misi ibadahnya. Belum lagi beragam pula dalam memandang hukum, atau istilah lain, yaitu potensi *khilafiah* (pertentangan)-nya. Itu tergantung pihak mana mau dimanfaatkan. Pada masa Orde Baru, sering kali hal seperti itu ditunggangi kekuasaan. Maka timbullah cap-cap Islam kanan, Islam radikal, dan Islam Fundamentalis.

Kendati begitu, Azyumardi sendiri tidak sepekat dengan cap-

cap seperti itu. Ia mengatakan pemerintah Orde Baru begitu piawai memanfaatkan potensi konflik yang ada pada diri umat Islam. Apakah tidak rukunnya Gus Dur dan Amien Rais sampai hari ini juga sengaja digerakkan oleh kepentingan di luar Islam? "Azumardi tidak membenarkan juga tidak menolak sinyalemen itu. Tapi aktivis CSIS tidak terima kalau lembaganya dikait-kaitkan dengan fenomena pertarungan antara tokoh-tokoh Islam, Gus Dur dengan Amien Rais.

Menurut mereka, CSIS hanyalah lembaga peneliti ilmu pengetahuan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan atau aktivitas unjuk menyudutkan Islam. Memang sudah bukan rahasia lagi kalau aktivis CSIS itu banyak orang-orang non-muslim. Misalnya Hari Tjani Silalahi, Sofyan Wandyadi, dan J. Kristiadi.

Tapi ada juga aktivis muslim se-

perti Gus Dur, Daud Yusuf, Muslim Abdurrahman, dan Bambang Triantoro. "Tuduhan CSIS terlibat adu domba Islam itu bohong besar," kata J. Kristiadi Direktur Eksekutif CSIS.

Pengamat politik yang belakangan namanya berkibar itu malah mencurigai, informasi adu domba sesama agama itu adalah informasi sampah yang tak perlu ditanggapi.

Hal yang sama juga diungkapkan Pengamat Intelijen, Dr A.C. Manullang. Menurut dia, tidak mungkin Kristen atau Katolik di Indonesia ini mampu menggoyang kekuatan Islam. Sebab Islam, apakah itu NU atau Muhammadiyah terlalu besar untuk bisa digoyang. Selain itu, tokoh-tokoh Kristen, termasuk yang ada di CSIS tidak bakal mampu mencampuri urusan dua tokoh ormas Islam terbesar di tanah air itu. Kalau *toh* dua pemimpin Islam, Gus Dur dan

Amien Rais terlibat perseteruan panjang dari dulu hingga sekarang, itu karena disebabkan konflik interes mereka sendiri.

Intervensi Asing

Tapi memang, kata Manullang, ada kekuatan intelijen yang sebenarnya sudah melakukan intervensi radikal terhadap Islam ini. Intervensi asing ini sudah lama, dan sekarang lebih gawat lagi. Yang paling mutakhir adalah indikasi keterlibatan agen rahasia Barat, entah CIA (Amerika), MOSAD (Israel), M-16 (Inggris), atau KGB (Rusia). Mereka ini punya kepentingan besar untuk membuat pemeluk Islam di bumi pertiwi ini terpecah belah. Termasuk ikut menunggangi konflik perseteruan antara Gus Dur dengan pemimpin Islam yang lain seperti Amien Rais, Akbar Tandjung, Laskar Jihad, KISDI, atau aktivis NU.

Ada kepentingan material dari sejumlah negara yang menanamkan agen rahasianya di Indonesia. Negara ini dibuat lemah, sehingga mereka leluasa menguasai ekonomi. Kepentingan lain memotong ancaman negara Islam, atau hadirnya pemimpin Islam fundamental di negeri ini.

Dalam kaca mata Intelijen asing, kalau negara ini dipimpin seorang fundamentalis, entah itu fundamentalis Islam atau Krisiten, akan melahikan terorisme-terorisme. "Maka itu, tokoh-tokoh Islam harus diadu domba biar lemah," kata mantan Direktur Intelijen Bakin yang akrab dengan aktivitas CIA ini.

Dikatakannya, operasi Intelijen juga tengah digalang untuk ikut menentukan siapa yang bakal jadi presiden menggantikan Gus Dur, kalau memang mantan ketua PB NU itu berhenti di tengah jalan. Hampir tidak pernah luput dari intervensi radikal operasi intelijen Barat, di setiap pemantapan kekuasaan sebuah negeri berkembang. Apa lagi Indonesia, yang penduduknya mayoritas muslim terbesar di seluruh dunia ini. Sudah tentu segala permasalahannya tidak

lepas dari kepentingan asing. (A) Apa yang dianalisis pengamat intelijen itu bisa jadi benar adanya. Bayangkan, sudah sekian lama kedua tokoh Islam, dibikin saling curiga, dan bersitegang. Ingat kasus Ambon, Maluku Utara, Aceh, dan Poso. Belum reda, kasus saling Jewet antara lembaga kepresidenan dengan lembaga legislatif, masih ditambah lagi polemik masalah-masalah interpelasi, hak angket, kasus *Texmaco*, *Buloggate*, *Brunaigate*, *Teperunggate*, penangkapan tokoh kritis, maupun perang urat saraf lainnya.

Bisa dibalang, hampir selama masa tugas DPR-RI, nyaris setiap hari hanya disibukkan oleh baku hantam antarkelompok yang ada di DPR-RI. Yakni, kelompok permanen yang propemerintah dengan kelompok parlemen yang tidak memerintah. Semua ini mengarah mengarah pada pertentangan Islam vs Islam. Lantas, siapa yang menciptakan ini semua? "Kekuatan teror intelijen," imbuh Manullang.

Konon, Amien merasa terpukul ketika dituduh banyak pihak, terutama kalangan dekat Gus Dur bahwa dirinya punya ambisi menjatuhkan Gus Dur dengan pernyataan-pernyataannya. Memang sejak itu, Amien seperti sakit hati dengan Gus Dur. Belum lama ini, ia malah mengeluarkan sindiran untuk tidak akan mengkritik Gus Dur lagi. "Tapi konsekuensinya, Pak Amien tidak akan mau kompromi dengan Gus Dur," imbuh sumber OPOSISI lainnya.

Entah, sampai kapan konflik ini terus melaju. Sampai kapan pula pihak lain berhenti menunggangi konflik sesama tokoh muslim ini? Yang jelas, akibat bentrok kedua tokoh muslim ini tentu ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan. Mungkin saja sisa-sisa Orde Baru, atau musuh-musuh Islam yang telah memetik buahnya. Untuk itu, tidak ada kata lain bagi para pemimpin Islam, kecuali harus sadar bahwa di sekitar pertarungan mereka ada pihak lain yang bertepuk tangan. *Wallahu alam*, sebagai permasalahannya tidak

Inilah perhelatan akbar pertama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibuka Presiden KH Abdurrahman Wahid di Stadion 10 November Tambaksari, Minggu (23/7). Mukhtamar partai pemenang ketiga dari pengumpulan suara saat pemilu 1999 lalu ini, disebut-sebut merupakan ajang pengukuhan legitimasi terhadap keberadaan partai warga NU.

SEBAB PKO yang dideklarasikan sebagai partai warga NU ternyata mampu meraup suara yang signifikan dan mengungguli suara PPP, walaupun jumlah perolehan kursi di DPR masih di bawah PPP. Namun banyak pihak, terutama di kalangan NU sendiri, mengatakan, perolehan suara PKB dalam Pemilu 1999 lalu hanya mengumpulkan suara 12%, masih di bawah perolehan Partai NU saat pemilu 1955 lalu, yakni 18%.

Keberhasilan PKB meraup suara ini tidak lepas dari peran Gus Dur sebagai deklarator, dan legitimasi NU terhadap PKB. Walaupun ada beberapa partai yang mengkalim juga sebagai partainya orang NU, seperti Partai Nahdlatul Ummah (PNU), dan Partai Kebangkitan Ummat (PKU), namun kedua partai ini tidak memperoleh suara yang signifikan. Dan, satu lagi yakni Partai Sunni pimpinan Abu Hasan juga tidak memperoleh satu pun kursi di DPR.

PKU dan PNU sendiri, kabarnya akan terkena diskualifikasi karena tidak mencapai 2% atau 10 kursi di DPR. Kabarnya juga, kedua partai ini sudah melakukan pendekatan untuk melakukan merger ke PKB. Hal ini diperkuat oleh tengara KH Solahuddin Wahid salah satu ketua DPP PKU, yang diakomodir di PD NU sebagai salah satu ketua. Gus Solah yang

juga adik Gus Dur ini, sangat berkenan kalau PKU melebur ke PKB.

Pada Mukhtamar I PKB ini, kendati Gus Dur tidak lagi menjadi Ketua Umum PB NU, justru legitimasi Gus Dur mengenai siapa yang pantas menakhodai PKB sangat menentukan. Sebab tanpa restu Gus Dur, apalagi terkesan berseberangan, maka hampir bisa dipastikan, bakal terjungkalkan. Gus Dur di kalangan warga NU dan PKB dianggap sebagai tokoh panutan, punya karisma yang sangat besar. Bahkan ada yang menilainya mendekati sosok seorang wali.

Makanya jangan heran, banyak orang berebut restu Gus Dur untuk menduduki posisi kunci. "Gus Dur lah yang memegang kunci tentang siapa yang pantas menakhodai PKB," tegas KH Farhan SAA, ulama NU asal Babat Lamongan kepada OPOSISI.

Mantan Ketua GP Ansor Jatim yang sering mengawal Gus Dur itu, lalu menyebut beberapa kandidat yang sering sowan ke beberapa kiai, termasuk ke KH Abdullah Faqih. Tentu saja dalam rangka mencari legitimasi ulama.

Tapi Farhan menolak membeber siapa yang sering sowan ke Mbah Faqih. "Tidak usah sekarang, nanti saja," katanya.

Salah seorang kandidat calon Ketua Umum PKB, Alwi Sihab,

kabarnya juga mendapat dukungan ulama-ulama Jatim. Modal dasar inilah yang kemudian dikembangkan kubu Alwi untuk terus maju pantang mundur. Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim, KH Anwar Iskandar, dalam satu kesempatan silaturahmi DPW PKB Jatim di Islamic Center Surabaya, menyebut-nyebut nama Alwi Sihab sebagai orang yang pantas menggantikan posisi Matori. Alwi sendiri tidak mengelak. Namun, secara diplomatis ia menyatakan, kesediaan dirinya tergantung restu para ulama. "Saya terserah ulama dan restu Gus Dur," ucap Alwi pada OPOSISI belum lama ini.

Sejak beberapa ulama Jatim memberi angin segar, bahkan lampu hijau, bagi Alwi Sihab yang kini menjabat Menteri Luar Negeri ini, para pendukung Matori di Jawa Timur mulai melakukan manuver.

Asal tahu saja, posisi Jawa Timur bak seorang gadis cantik yang menjadi incaran setiap kandidat calon ketua. Ingat, Jatim menguasai hampir 48% suara. Dalam Anggaran Rumah Tangga PKB, disebutkan setiap cabang mempunyai hak satu suara, ditambah suara setiap 5 perolehan kursi DPRD II satu suara. Karena Jatim menang dalam pemilu, dan di beberapa Dali II PKB tampil mayoritas, maka suara Jatim sangat besar. Tentu saja, jika hitungan matematis itu dibuat dan solid.

Sejken PKB Muhaemin Iskandar, yang disebut-sebut sebagai salah seorang pendukung Matori Abdul Djamil, ketika acara persiapan pembukaan Mukhtamar di Asrama Haji Surabaya (AHS) Selasa (11/7) pekan lalu langsung menilai Alwi tidak pantas menakhodai PKB. "Ya, Pak Alwi di Mentu saja," kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Muhaemin langsung memuji keberhasilan Matori meredakan konflik di bawah. "Pak Matori dalam waktu kurang dari 2 tahun



mampu membawa PKB seperti sekarang, ini sebuah prestasi yang bagus," kata Muhaemin.

Kabarnya, kubu Matori memang pintar membikin strategi. Sepekan sebelum pembukaan, Matori diketahuhi melakukan gerilya ke daerah Tapal Kuda, Jatim. Menurut sumber OPOSISI, Matori punya target 'mengobrak-abrik' soliditas Jatim. "Ya, untuk mencari dukungan Jatim, karena kabar yang beredar Jatim akan mendukung Alwi," legas sumber tersebut.

Matori sendiri, kabarnya, kurang harmonis dengan elite ketua DPW Jatim. Nahkan ketika berkunjung ke Surabaya, beberapa bulan lalu, Matori memilih mampir ke ruang fraksi PKB DPRD Jatim, bukan ke kantor DPW PKB Jatim di Jl. Musi No 1 Surabaya. Ketua DPW PKB Jatim, Choirul Anam, mengakui kedatangan Matori di Jatim. "Matori ke Situbondo," ujar Anam kepada OPOSISI Kamis pekan lalu.

Menurut Effendy Choirie, ketua

Departemen Humas DPP PKB, Matori yakin juga didukung beberapa DPC di Jatim. Politisi asal Gresik ini yakin beberapa DPC di Jatim tidak satu kata dengan DPW. "Banyak yang mendukung Matori kok," tegasnya.

Sabotase Suasana panas menjelang Sidang Umum Tahunan MPR juga terasa di Surabaya - tempat digelarnya perhelatan akbar Mukhtamar I PKB. Entah, tiba-tiba Ketua Panitia Daerah Mukhtamar I PKB Drs H Choirul Anam memberi keterangan pers seputar suasana di Kota Pahlawan ini. Dalam penjelasannya, ada tengara kuat elite politik anti-Gus Dur sedang melakukan sabotase untuk membikin kacau pelaksanaan mukhtamar.

Tengara Cak Anam, demikian ketua DPW PKB Jatim itu akrab dipanggil, setelah meluncur isu kelangkaan BBM di Surabaya, dan beberapa daerah di Jawa Timur, sepekan sebelum digelar

pembukaan. "Ini pasti disusupai untuk mengganggu suksesnya mukhtamar. Masak, isu kelangkaan BBM, juga berlatar dengan putusnya kabel serat optik milik PT Telkom, sehingga jalur komunikasi ke wilayah Indonesia timur terputus," katanya kepada OPOSISI.

Cak Anam memang boleh berang. Sebab dari berbagai laporan DPC-DPC se Jatim yang bakal meramalkan pembukaan mukhtamar, sebagian besar merasa kesulitan mendapat kendaraan, karena faktor kelangkaan BBM tadi. "Saya sudah telepon ke daerah-daerah, mereka menepah sulit mendapat bus. Apa mereka ke Surabaya akan naik sepeda pancel?" tegasnya.

A lalu dengan sedikit emosional Cak Anam menyebut beberapa nama elite politik yang ditenagai berada di balik skenario itu. Elite politik mantan menteri di zaman Soeharto ini memang sering melancarkan kritik pedas, dan kerap berkonspirasi untuk menjatuhkan Gus Dur. "Sebagai mantan menteri kan gampang untuk mengaranan distorsi," tapilannya.

Tapi Cak Anam mengelak ketika ditanya siapa gerangan mantan menteri yang disebut-sebut itu. "Iu yang sedang kita cari, dan nanti urusanya dengan polisi," legasinya. Para mukhtamirin PKB nantinya akan menugutkan legitimasi dukungan kepada Gus Dur - sebagai ketua Dewan Syuro. Nah, orang-orang itu kan tidak suka dengan Gus Dur, tambahinya.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jatim, Fuad Anwar. Menurut Fuad, pilakunya sedang gamang kalau kelangkaan BBM di Jatim karena alasan teknis. "Pasti ada unsur politisnya, tidak sekadar persoalan teknis," tegas sekretaris DPW PKB Jatim ini.

Namun Humas Pertamina UPDPD Jatim, Asep Anumuddin, membantah tuduhan itu. Me-

mulutnya, kelangkaan BBM lebih banyak karena faktor teknis, yakni banyaknya permintaan, akibat berakhirnya masa liburan memasuki masa masuk pertama sekolah. "Kan Minggu-nya itu banyak orang yang sewa kendaraan liburan pulang, jadi terasa. Apalagi kita yang biasa gampang tiba-tiba autie, lalu masyarakat menngina akan ada kenaikan BBM," kata Asep.

Kasihan NU-nya ? Ditemui secara terpisah, warga Nahdliyyin non-PKB, Drs Masykur Hasyim menilai, PKB sudah semestinya berani meninggalkan bayang-bayang kebesaran Nahdlatul Ulama (NU). Sebab, NU tidak identik dengan PKB. Jadi, wacana yang harus dikembangkan dalam mukhtamar pertamanya harus berani membikin platform, NU bukan PKB, dan PKB bukan NU. "Terus terang, PKB jangan menyusu terus di pangkuan NU. Sebagai jamiyah, warga NU masih banyak di luar PKB. Apakah, mereka yang menyalurkan aspirasinya di luar PKB lalu tidak diakui sebagai warga nahdliyyin? Kalau ini yang terjadi, NU itu kecil dan sempit sekali," papar Masykur Hasyim yang juga aktivis Partai Persatuan Pembangunan Jatim ini.

Masykur kemudian mengingatkan, jika kelak PKB hancur, maka kehancuran itu, jangan dibebankan kepada NU. "Terlalu murah, jika NU cuma dijadikan kendaraan politik aktivis PKB. Karena, ketidakberhasilan PKB, NU harus membayar mahal. Juga para kiai khs, jangan diredahkan, hanya sekadar untuk kepentingan politik sesaat. Sebab, kiai-kiai khs ini memanggul jamiyah.

Namun, kalau PKB berhasil menjaga jarak dengan NU, bila suatu saat terjadi gonjangan-ganjing, maka NU-nya tetap selamat. Dan, warga NU yang lain tak perlu menanggung beban sejarahnya. --- © matus all/riz

Ancaman Balkanisasi Pendukung Gus Dur

Jakarta mulai berbau amis darah. Dua kubu kelompok massa yang berlawanan siap bentrok fisik untuk mempertahankan keyakinan mereka. Di satu sisi mereka ada yang mendukung Presiden Gus Dur, tapi di sisi lain ada pula yang mendesak presiden agar mundur dari jabatannya. Akankah mereka bertarung untuk mempertahankan prinsip masing-masing?

ITULAH fakta lapangan. Menyambut Sidang Umum Tahunan Agustus ini, di lapisan bawah telah mengkristal kumpulan-kumpulan massa yang siap meneka satu sama lain. Mereka sudah terpelembek menjadi dua kubu besar. Kubu pendukung Gus Dur. Dan kubu penolak Gus Dur. Mereka rela mengorbankan kekuatannya untuk membela figur masing-masing pemimpinnya. Konon, sponsor dana juga sudah siap di masing-masing kubu yang ada. Tinggal tunggu komando. Tinggal tunggu waktu. Kapan mereka bergerak di lapangan, dan kapan pula pertempuran massa bawah terjadi dengan hebatnya. Gawat!

Tampaknya, Gus Dur memang masih aman pada ST MPR Agustus ini. Artinya, tidak akan turun dari jabatan presiden. Setidaknya, itu janji yang keluar dari Ketua MPR Amien Rais. Sebab tidak ada alasan mendasar, bahwa Gus Dur telah menyimpang dari amanat MPR, yaitu GBHM maupun UUD '45. Tapi begitulah. Kata-kata memang tinggal kata-kata. Sang pemenang lalu MPR ini bicara lain lagi pada yang hari berbeda. "Nasib Gus Dur tidak akan lama lagi," kata Amien Rais.

Hentakan-hentakan Amien Rais itulah yang membuat massa pendukung Gus Dur makin panas kuping. Bahkan mereka tidak sabar untuk segera mengasah golok. Siapa yang akan digolok? Tentu bukan Amien Rais, tapi massa yang mendukung Amien Rais. Bahkan, ada yang menyebut Gus Dur telah menjadi 'tawanan' ketua MPR. "Ini memang gawat," kata Ketua PRD Budiman Sudjatmiko. Bahkan Budiman seperti tidak tega untuk mengatakan, bahwa tempo massa antarpendukung bisa meledak. "Dan itu akan menyalak balkanisasi (salting bunuh-membunuh, Red)," lamban Budiman pada OPOSISI.

Apa yang terpendam dalam hati pendukung Gus Dur memang tidak ada yang tahu pasti. Tapi letupan-letupan lengket dan rasa geram sudah tampak. Pada Mukhtamar PKB di Surabaya Jawa Timur pekan silam, sudah ada sebagian massa mukhtamar yang mendesak multatamin untuk mengepung Gedung DPR/MPR pada SU Tahunan ini. Para petinggi NU, termasuk Gus Dur sendiri tidak mengizinkan.

Tapi siapa tahu, kelompok-kelompok massa akan bergerak ke Jakarta tanpa komando. Malah ada informasi, sudah ada sejumlah Ruko (rumah toko, Red), di kawasan Jakarta yang disewa aktivis-aktivis ormas pemuda sebagai *base camp* selama ST MPR Agustus ini.

Ketua UMPM PB NU, KH Hasyim Muzadi juga belum memberi aba-aba kepada Banser. Ia hanya menekankan perlunya warga NU untuk membela Gus Dur kalau sang presiden dijatuhkan dengan paksa. Ada upaya paksa untuk mendongkel presiden. Maka itu, menjadi kewajiban warga NU untuk membelanya," kata Idris dari Pondok Al-Hikmah Malang ini dengan mimik serius.

Peta Keuatan Massa Barangkali memang tidak seklar warga NU yang merasa was-was jika Gus Dur dijatuhkan di tengah jalan. Masih ada sederet elemen gerakan massa yang siap membela Gus Dur. Mereka terdiri dari elemen gerakan mahasiswa, buruh, dan LSM. Kelompok ini, menurut sumber OPOSISI di kalangan mahasiswa, telah dirangkul Hasyim Wahid, alis Gus Im, yang juga adik Gus Dur sendiri. Gus Im telah menggalang dukungan di basis gerakan massa ini.

Selain gerakan massa PMII (Perhimpunan Mahasiswa Islam

(Indonesia), Ikatan Putra-Putri NU (IPPPNU), Ikatan Pemuda NU (IPNU), di sana ada juga kelompok mahasiswa Forum Kota (Forkot), Jaringan Ginandjar Kartasasmita, Fuad Bawazier, Akbar Tandjung, dan Arifin Panigoro sebagai 'Bapak Perusuh Indonesia' yang terus menggoyang Gus Dur.

Menurut Humas Forkot, Mixil, sebetulnya Forkot tidak semata-mata membela Gus Dur. Tapi memang ada dasar-dasar demokrasi yang tengah di bangun Gus Dur. Di sanalah, kepentingan Forkot bertemu dengan kepentingan kelompok yang mempertahankan Gus Dur. "Melakukan gerakan massa merupakan wujud aspirasi yang sah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggerakkan massa dalam membendung kekuatan-kekuatan yang ingin menggusur Gus Dur," katanya.

Para pendukung Gus Dur boleh merancang agenda pengerahan massa. Tapi jangan lupa, di kubu lain juga terjadi gemuruh yang sama. Kubu anti-Gus Dur juga akan menggerakkan kekuatan massa untuk mendesak Gus Dur supaya mundur dari jabatannya. Di sana ada Hammas (Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), FPI (Front Pembela Islam), Laskar Jihad, dan KAMMI (Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia). Barisan ini akan mengkritisi Gus Dur dari sisi bobrok ekonomi, keamanan, munculnya KKN baru, dan lembeknya penegakan hukum. Mereka tidak kalah agresif dalam menggiring tekanan-tekanan supaya Gus Dur berhenti dari labiat kontroversinya. Kalau tidak? "Mundur sekarang juga," kata Muhammad Alvin, ketua Hammas.

Alvin menambahkan, sudah banyak kesalahan dilakukan Gus Dur selama setahun pemerintahannya. Banyak pernyataan politik presiden yang merugikan umat Islam. Mulai dari upaya pencabutan Tap MPRS 25/1966, soal hubungan degang dengan Israel, sampai ucapannya yang saban hari semakin memancing amarah rakyat. Bagi Hammas, mendesak Gus Dur dengan

demonstrasi merupakan pekerjaan wajib. Dengan 3000-an pendukung, Hammas selalu siap untuk mengempur Gus Dur jika tidak berhenti dari labiat kontroversinya. Menyambung Alvin adalah Ahmad Doly Kur-nia. Menurut Seljen PB-HMI ini, Gus Dur memang harus dikritisi dengan tegas. Dalam perjalanan hampir setahun ini, HMI melihat pemerintahan Gus Dur tidak kunjung membaik. Ekonomi morat-marit, pengangguran bertambah, dan yang paling parah kejahatan meledak di mana-mana. Dari semua kebrokohan ini menurut HMI, Gus Dur tidak punya kemampuan apa pun untuk mengatasinya. Karena itu, sangat berat Gus Dur dipertahankan kalau tidak mau berubah.



reformasi. Cuma memang ada yang sudah berbuah, ada pula yang masih proses. Tapi apa pun hasilnya, tidak ada alasan untuk menurunkan Gus Dur sebelum 2004. SU Tahunan bagi PMII hanya untuk menilai progress report pemerintahan Gus Dur dan mengamandemen UUD '45. Bukan untuk mengisap pemerintahan Gus Dur. Demikian juga pendapat elemen gerakan massa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Meski mereka mengaku pada posisi independen, namun mereka akan menolak juga jika ada upaya peminggiran.

Gus Dur dari kursi presiden. Dengan kekuatan 50 Cabang, dan massa pendukung di Jakarta hingga 2000 orang, PMKRI akan ikut ambil bagian dalam mempertahankan Gus Dur. Sementara Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) juga akan memperhitungkan lawan-lawan kekuatan-kekuatan yang ingin menurunkan Gus Dur.

Sebaliknya, PMII siap memben-tengi Gus Dur dalam menjalankan selengkap agenda reformasi. Dalam pandangan PMII, Gus Dur masih konsisten untuk menjalankan agenda

dan seruan-seruan. Sebab kalau sampai terjadi *chogy* dan bentrok massa antarpendukung, yang untung bukan pendukung Gus Dur atau lawannya yang anti-Gus Dur. Tapi orang-orang yang tidak menghendaki realisasi reformasi. "Orang-orang Orde Baru dan tentara akan betapak tangan," tegas Fikrus Hurlin, ketua umum PB GMNI pada OPOSISI.

Sayap pendukung Gus Dur lain adalah gerakan massa dari Forum Kota (Forkot). Basis massa forkot yang militan ini juga akan membent-up Gus Dur mati-matian. Dalam pandangan mereka, Gus Dur adalah simbol rakyat tertindas selama Orde Baru. Gus Dur pula yang terus berkejar untuk menggusur orang-orang Soeharto dengan segala KKN-nya. Untuk itu, Forkot yang konon sudah terpecah itu akan menghadang gerakan massa yang memaksa Gus Dur jatuh. Forkot pula yang sudah memulai demonstrasi pekan lalu dengan membakar bendera Golkar. Bagi Forkot, Golkar adalah sarangnya orang-orang Orde Baru yang anti-reformasi. Orsospol ini harus dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.

Forkot juga menuding di DPR/MPR bercokol para perusuh dan biang kerok ketegangan antarelite politik. Disebutlah Ginandjar Kartasasmita, Fuad Bawazier, Akbar Tandjung, dan Arifin Panigoro sebagai 'Bapak Perusuh Indonesia' yang terus menggoyang Gus Dur. Menurut Humas Forkot, Mixil, sebetulnya Forkot tidak semata-mata membela Gus Dur. Tapi memang ada dasar-dasar demokrasi yang tengah di bangun Gus Dur. Di sanalah, kepentingan Forkot bertemu dengan kepentingan kelompok yang mempertahankan Gus Dur. "Melakukan gerakan massa merupakan wujud aspirasi yang sah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggerakkan massa dalam membendung kekuatan-kekuatan yang ingin menggusur Gus Dur," katanya.

Serang Balik Para pendukung Gus Dur boleh merancang agenda pengerahan massa. Tapi jangan lupa, di kubu lain juga terjadi gemuruh yang sama. Kubu anti-Gus Dur juga akan menggerakkan kekuatan massa untuk mendesak Gus Dur supaya mundur dari jabatannya. Di sana ada Hammas (Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), FPI (Front Pembela Islam), Laskar Jihad, dan KAMMI (Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia). Barisan ini akan mengkritisi Gus Dur dari sisi bobrok ekonomi, keamanan, munculnya KKN baru, dan lembeknya penegakan hukum. Mereka tidak kalah agresif dalam menggiring tekanan-tekanan supaya Gus Dur berhenti dari labiat kontroversinya. Kalau tidak? "Mundur sekarang juga," kata Muhammad Alvin, ketua Hammas.

Alvin menambahkan, sudah banyak kesalahan dilakukan Gus Dur selama setahun pemerintahannya. Banyak pernyataan politik presiden yang merugikan umat Islam. Mulai dari upaya pencabutan Tap MPRS 25/1966, soal hubungan degang dengan Israel, sampai ucapannya yang saban hari semakin memancing amarah rakyat. Bagi Hammas, mendesak Gus Dur dengan

demonstrasi merupakan pekerjaan wajib. Dengan 3000-an pendukung, Hammas selalu siap untuk mengempur Gus Dur jika tidak berhenti dari labiat kontroversinya. Menyambung Alvin adalah Ahmad Doly Kur-nia. Menurut Seljen PB-HMI ini, Gus Dur memang harus dikritisi dengan tegas. Dalam perjalanan hampir setahun ini, HMI melihat pemerintahan Gus Dur tidak kunjung membaik. Ekonomi morat-marit, pengangguran bertambah, dan yang paling parah kejahatan meledak di mana-mana. Dari semua kebrokohan ini menurut HMI, Gus Dur tidak punya kemampuan apa pun untuk mengatasinya. Karena itu, sangat berat Gus Dur dipertahankan kalau tidak mau berubah.

Soal kapan Gus Dur harus ditumbangkan, Doly tidak menjawab pasti. Yang jelas, katanya, mekanisme Ketatanegaraan sudah mengaturnya. Dan itu sudah menjadi otoritas MPR. Kalau memang Gus Dur terbukti melanggar konstitusi, GBHM dan UUD '45, menjatuhkan Gus Dur lewat Sidang Istimewa merupakan hal yang sah sesuai konstitusi juga. Sebagai aktivis massa, Doly tidak bisa memungkiri akan terjadi bentrok massa antarpendukung.

Sebab, katanya, pendukung Gus Dur sudah mulai tidak rasional. Misalnya menggunakan semangat harus mempertahankan Gus Dur. "Kalau itu terjadi, Jakarta akan banjir darah," katanya.

Untung saja, Kapolri Jenderal Pol Rusdiharjo jauh-jauh hari sudah melarang tegas masuknya laskar-laskar sipil ke lokasi MPR/DPR pada sidang berlangsung. Mungkin saja lokasi sidang bisa bebas dari kepungan massa masing-masing pendukung. Tapi bukan hal yang salah kalau massa malah akan berhamburan di jalan-jalan, seperti di kawasan Jalan Gatot Subroto depan DPR/MPR.

Dalam kondisi massa yang mulai memanas itu sangat rawan bentrok. Atau massa malah akan bentrok dengan aparat yang jumlahnya 23.000 di sekeliling kompleks DPR/MPR. Dua-duanya menyimpan peluang. *Wallahu'alam.*

Dom molidak di depan rumah Dubes Filipina, Prolidron Gus Dur monding, kalompok yang terkait dengan gejala di Filipina Selatan ikut bertanggung jawab. Mengapa, pongoboman ini terjadi sebelum sebelum digolaryn Sidang Tahunan MPR? Adakah pongoboman itu bagian dari skenario terorisme Internasional untuk moruntuhkan kowibawanan Presiden Gus Dur?

Adalah tuntutan perubahan dengan segala bentuk kebebasan. Rakyat tidak lagi mau tunduk terhadap rezim, masyarakat di daerah tidak lagi mau menepati, lagi sebagainya, (Frasan masa lalu lepas dan melangkah menuntut untuk memisahkan diri, bahkan semangat perubahan diri itu sudah banyak meluas karena korban masyrakat).

Terdah yang ini dan di beberapa insidensi, yang saat ini tengah berlangsung kota-kota lain di Jawa Jakarta.

... (tand, apa yang bakal terjadi, atau Indonesia sudah diarahkan teroris? Seperti dipaparkan oleh sejumlah negara yang menajidi objek teroris, misalnya Libya, Palestina, dan Lebanon. Indonesia bakal terarah ke sini, masalah keamanan bakal menjadi di masalah teroris. Sedangkan, konstitusi Ambon dan Aceh sudah menjadi bukti. Pemerintah sudah diawasi sebab, bahkan sudah tidak punya kemampuan untuk tidak mendampingi konstitusi di daerah itu. Dengan mengonfirmasi terus berkecambah di daerah teroris seperti ini. Banyak pengamat memperkirakan, hingga satu generasi lagi belum tentu konstitusi bakal selamat.

Merunut pengamat intelijen, yang juga mantan Wakil Kepala Badan Intelijen ADRI) Syamsi Sirag, teroris me bisa muncul dari dalam negeri maupun luar negeri. Itu berarti, segala teroris yang terjadi di Indonesia tidak bisa dikata berfils teroris. Selain ada negara-negara besar dan negara maju yang menamakan kepentingannya.

Mereka akan memengaruhi setiap

ASAL tahu saja, gejala di Filipina Selatan - antara Moro National Liberation Front (MNF) dan pemerintah Filipina - terjadi dengan Indonesia. Setelah tahun 1978, pemerintah RI sudah berbagai mediasi antara kedua pihak yang sedang berfils, antara Filipina Selatan dan Israel. Libya 1978, mengancam dipaparkan. Pada tahun 1980 lalu, karena mereka muslim Indonesia ch susah terjatuh. MNF pimpinan Nur Murtadi mulai teroris, teroris tak percaya lagi dengan MNF, kemudian sebagian aktivis lainnya menadik Moro Islamic Liberation Front (MILF) di bawah kepemimpinan Hashim Salamat. Namun, pimpinan MILF pimpinan Abu Syarif menolak berkolaborasi dalam pengoboman kediaman Dubes Filipina di Jakarta. Lantas, siapa gelata sebenarnya?

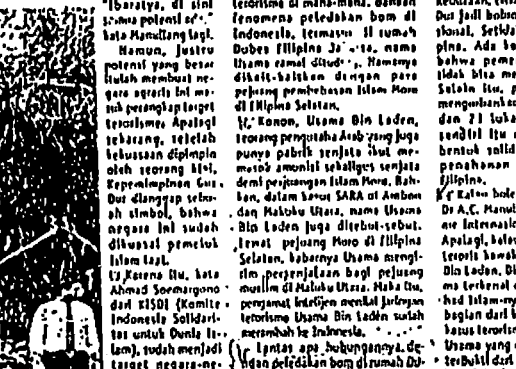


... (tand, apa yang bakal terjadi, atau Indonesia sudah diarahkan teroris? Seperti dipaparkan oleh sejumlah negara yang menajidi objek teroris, misalnya Libya, Palestina, dan Lebanon. Indonesia bakal terarah ke sini, masalah keamanan bakal menjadi di masalah teroris. Sedangkan, konstitusi Ambon dan Aceh sudah menjadi bukti. Pemerintah sudah diawasi sebab, bahkan sudah tidak punya kemampuan untuk tidak mendampingi konstitusi di daerah itu. Dengan mengonfirmasi terus berkecambah di daerah teroris seperti ini. Banyak pengamat memperkirakan, hingga satu generasi lagi belum tentu konstitusi bakal selamat.

operator teror, yang penting timbunan materil. Makanya, tak perlu heran kalau ada pelabu teroris yang banyak melakukan tugas-tugasnya demi dollar asias bayaran.

Syamsi kembali menegaskan, tenaga teroris bisa juga dihebut dari kalangan sipil biasa. Tapi mereka harus dilatih dengan ilmu standar intelijen. Tanpa itu, musti

... (tand, apa yang bakal terjadi, atau Indonesia sudah diarahkan teroris? Seperti dipaparkan oleh sejumlah negara yang menajidi objek teroris, misalnya Libya, Palestina, dan Lebanon. Indonesia bakal terarah ke sini, masalah keamanan bakal menjadi di masalah teroris. Sedangkan, konstitusi Ambon dan Aceh sudah menjadi bukti. Pemerintah sudah diawasi sebab, bahkan sudah tidak punya kemampuan untuk tidak mendampingi konstitusi di daerah itu. Dengan mengonfirmasi terus berkecambah di daerah teroris seperti ini. Banyak pengamat memperkirakan, hingga satu generasi lagi belum tentu konstitusi bakal selamat.



... (tand, apa yang bakal terjadi, atau Indonesia sudah diarahkan teroris? Seperti dipaparkan oleh sejumlah negara yang menajidi objek teroris, misalnya Libya, Palestina, dan Lebanon. Indonesia bakal terarah ke sini, masalah keamanan bakal menjadi di masalah teroris. Sedangkan, konstitusi Ambon dan Aceh sudah menjadi bukti. Pemerintah sudah diawasi sebab, bahkan sudah tidak punya kemampuan untuk tidak mendampingi konstitusi di daerah itu. Dengan mengonfirmasi terus berkecambah di daerah teroris seperti ini. Banyak pengamat memperkirakan, hingga satu generasi lagi belum tentu konstitusi bakal selamat.

menyambut demokrasi, HAM, dan ekonomi.

... (tand, apa yang bakal terjadi, atau Indonesia sudah diarahkan teroris? Seperti dipaparkan oleh sejumlah negara yang menajidi objek teroris, misalnya Libya, Palestina, dan Lebanon. Indonesia bakal terarah ke sini, masalah keamanan bakal menjadi di masalah teroris. Sedangkan, konstitusi Ambon dan Aceh sudah menjadi bukti. Pemerintah sudah diawasi sebab, bahkan sudah tidak punya kemampuan untuk tidak mendampingi konstitusi di daerah itu. Dengan mengonfirmasi terus berkecambah di daerah teroris seperti ini. Banyak pengamat memperkirakan, hingga satu generasi lagi belum tentu konstitusi bakal selamat.

operator teror, yang penting timbunan materil. Makanya, tak perlu heran kalau ada pelabu teroris yang banyak melakukan tugas-tugasnya demi dollar asias bayaran.

Syamsi kembali menegaskan, tenaga teroris bisa juga dihebut dari kalangan sipil biasa. Tapi mereka harus dilatih dengan ilmu standar intelijen. Tanpa itu, musti

Mega digertak, Mega Keder, atau Dijebak

Usai sudah perhelatan Sidang Tahunan MPR yang digelar menjelang HUT ke-55 RI. Meski banyak yang meramal ST-MPR bakal 'berdarah-darah', toh kenyataannya berbalik 360 derajat. Namun, sidang yang berjalan smooth itu tiba-tiba tensinya tinggi ketika memasuki ruang Komisi C - yang membahas laporan pertanggungjawaban lembaga tinggi negara, termasuk laporan progress report pemerintahan Gus Dur. Suasana ruang sidang Komisi C yang berada di bawah gedung bundar MPR/DPR itu seakan menjadi saksi bahwa peluang besar Wapres Megawati yang tinggal selangkah menggantikan posisi Presiden KH Abdurrahman Wahid akhirnya sirna juga. Tiga fraksi yakni FPPP, Fraksi Reformasi, Fraksi PBB yang mencoba menggiring bola, dan ingin mengegolkan TAP Khusus MPR atas pemberian tugas-tugas teknis wakil presiden, akhirnya tak disambut oleh dua fraksi besar, PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Rupanya, pendukung Megawati menaruh rasa curiga atas pemberian tugas teknis itu. Selain itu, alasan konstitusional juga mengganjal. Sementara kabar tidak sedap lain, TAP khusus itu tak ubahnya cara Supersemar jilid II, yang ingin mengalihkan kepemimpinan Gus Dur ke Megawati. Dan itu tentu saja akan ditolak Megawati, karena Megawati tetap menilai Gus Dur seperti saudara.

Terlepas dari itu, ternyata di tubuh PDI-P sendiri terjadi perbedaan pendapat. Buktinya, di kalangan PDI Perjuangan ada dua kubu yang saling tarik menarik terhadap umpan yang diluncurkan Presiden Gus Dur itu. Kubu Poros Indonesia yang diwakili Zulfan Lindan menginginkan pemberian tugas teknis kepada wapres dikuatkan dengan TAP Khusus, sementara kubu 'Taufik Kiemas' yang diwakili Panda Nababan menolak keras TAP Khusus tersebut. Bisik-bisik minor atas kemampuan Megawati, memang bukan hal baru. Maka itu, begitu wapres ini menelantarkan peluang politik di Sidang Tahunan tempo hari, banyak kalangan berucap sayang. Ada apakah sejatinya, calon presiden dari PDI Perjuangan ini menolak umpan sedap dari Poros Tengah? Benarkah ada alasan tabu, yang berat untuk diungkap? Atau memang putri sulung Bung Karno ini masih pobia dengan Poros Tengah? Karuan, spekulasi beredar di kawasan Gedung MPR/DPR. Bahkan, sejumlah kalangan menilai penolakan TAP Khusus oleh PDI Perjuangan itu lantaran berkaitan dengan kemampuan Megawati me-manage negara. Ada yang meragukan kemampuan Megawati saat diberi umpan oleh Gus Dur.

Tentang skenario TAP Khusus tak ubahnya sebagai Supersemar jilid II, atau kudeta terselubung itu, dibantah keras Ny Aisyah Amini dari FPPP. "Anggapan itu sama sekali tidak benar," tegasnya kepada OPOSISI.

Menjebak Mega

Tapi menurut pengamat politik asal UGM Yogyakarta, penolakan FPDI-P terhadap usulan TAP Khusus itu merupakan langkah tetap.

Sebab TAP itu sebenarnya merupakan jebakan terhadap Megawati. "Yang saya lihat, ada upaya membelokkan 'kambing hitam', atau 'cuci tangan', masalahnya kalau TAP dibuat, kemudian nanti sampai masa akhir jabatan Presiden Gus Dur, maka ada dua orang yang akan berpidato untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Yakni, Presiden Gus Dur dan Wapres Megawati. Jadi ada komplikasi konstitusional.

Kedua, ada upaya, menurut hemat saya, upaya menjebak Megawati. Artinya, Megawati tidak punya cukup waktu untuk menggarasi persoalan, dan bisa saja Mega juga dibantai seperti halnya Gus Dur," tegasnya kepada OPOSISI. (lihat wawancara dengan Riswanda, Red) Tapi sampai sekarang banyak kalangan masih bertanya-tanya. Ada apa sejatinya hingga Megawati menolak TAP Khusus itu? Benarkah ada alasan tabu yang berat untuk diungkap? Atau putri sulung Bung Karno ini masih phobia terhadap kaukus Poros Tengah yang mempecundangi saat Sidang Umum MPR 1999 lalu. Atau PDI Perjuangan ogah terjebak permainan Presiden Gus Dur?

Kasak-kusuk pun berkembang. Ternyata, Megawati yang pernah digadang-gadang mayoritas rakyat Indonesia untuk menggantikan posisi mantan Presiden Habibie, masih malu-malu kucing. Maksud hati mau jadi presiden, tapi nyali tak sampai.

Index Berita

ARSIP

LAMAT REDAKSI

Kontak Redaksi
 Pena Building Lt
 1
 Ahmad Yani 88
 Surabaya - Jawa Timur
 Indonesia
 Telp: 031-8202101
 Fax: 031-8294612
 email:
 posisi@oposisi.com
 posisi@selaras.com
 Web Site
 //www.oposisi.com/

Tim Oposisi

Amazon.com

Search

Begitulah adanya. Mega yang dielu-elukan bakal menjadi ratu adil, tak urung menyerah sebelum bertarung. Keraguan terhadap kemampuan putri Bung Karno ini sebetulnya sudah lama beredar. Jauh sebelum Sidang Tahunan MPR Agustus ini, Mega sudah diragukan banyak kalangan. Tidak saja dalam menyambut peluang pelimpahan tugas dan wewenang Presiden Gus Dur kali ini. Tapi juga keraguan teknis Mega dalam mengomandani PDI Perjuangan.

Lantas, bagaimana dengan segudang carut-marutnya persoalan bangsa jika kelak ia menggantikan Presiden Gus Dur? "Wah, gawat benar," kata seorang anggota DPR RI dari PDI-P, yang kecewa banget dengan keraguan sang Mbak ini. Ketar-ketir terhadap kemampuan Mega makin kencang, tatkala publik mengingat kasus Maluku dan konflik Indonesia di kawasan Timur. Dua masalah ini sebetulnya sudah dilimpahkan Presiden Gus Dur kepadanya segera dibereskan. Tapi apa hasilnya? Megawati dinilai tak mampu melakukan tugas penyelesaian konflik di kawasan tersebut. Memang, sejumlah pendukung setianya sangat menyangkan peluang yang ada di depan mata itu harus sirna. Mereka pada kecewa, dan terlihat kesal atas kebijakan partainya. Namun, pendukung yang terbilang 'radikal' dalam pemikiran ini semakin sadar bahwa sang ibu masih jauh dari harapannya - dalam menjalankan roda teknis pemerintahan Gus Dur.

Itulah yang membuat sebagian kader PDI-P di MPR keder juga ketika Mega mendapat 'durian runtuh' berupa tawaran Tap Khusus dari tiga fraksi di Komisi C. Tiga fraksi, yakni PPP, PBB, dan Reformasi yang susah payah membangun peluang bagi Megawati untuk meraih wilayah politik lebih besar dalam memimpin kabinet, ternyata harus menanggung malu sendiri. Mereka tersipu-sipu malu, karena pihak yang diperjuangkan justru tidak mau menerimanya. Padahal, bola sudah di depan gawang, tinggal mengegolkan saja.

Begitulah, kekecewaan demi kekecewaan terus menumpuk. Bagi tiga fraksi yang kandas memperjuangkan peluang Mega itu, sebetulnya tidak terselip secuil pun niat jahat. Mereka mengaku, hanya satu kata kunci kenapa harus memperjuangkan peluang Mega dalam memimpin kabinet mendatang. Tidak lain, karena Gus Dur sudah dianggap kurang serius dan tidak mampu dalam me-manage kabinetnya. Terbukti, sudah sepuluh bulan kabinet yang di bawah komandonya tidak mampu mengatasi krisis hebat di bidang ekonomi maupun keamanan. Karena itulah, harus ada harapan baru. Harus ada komando baru untuk memaksimalkan kinerja kabinet. "Maka itu, kita doronglah Mbak Mega. Tapi apa boleh buat, yang didorong tidak mau berjalan," kata Patrialis Akbar, salah satu pendorong Tap Khusus dari Fraksi Reformasi dengan nada kecewa berat.

Senada dengan Patrialis Akbar adalah Surya Dharma Ali dari Fraksi PPP. Menurut Surya, sebenarnya tidak ada keuntungan bagi pihak PPP, kecuali keuntungan bangsa ini kalau Mega mau mengambil peluang untuk memimpin kabinet. Tapi ya begitulah, kata Surya Dharma. PDI-P punya logika sendiri, sementara pihak pendorong juga punya logika sendiri. Aktivis PPP, yang ruang kerjanya sempat ditembus peluru misterius beberapa bulan lalu itu akhirnya hanya bisa menghibur diri dengan nada tanya. Benarkah, sejatinya Megawati tidak punya nyali untuk memimpin kabinet? Tidak kalah sengit dalam berbagi kekesalan adalah Alvien Lie. Pria keturunan Cina ini yang ngetop di DPR RI lewat Hak Angket Brunaigate dan Buloggate ini malah mengaku sakit hati tiga kali. Pertama, dia harus sakit hati menerima kekalahan di forum majelis. Kedua, sakit hati karena diadili oleh fraksi, dan ketiga sakit hati diadili oleh ketua partainya.

Namun demikian, Alvien mengaku tidak surut langkah. Kalau ternyata kelemahan Gus Dur dalam memimpin kabinet itu tidak bisa dicover lewat Mega, ia bersama fraksi yang seide akan membuat gebrakan baru yang lain lagi. "Peperangan belum selesai. Masih ada peluang dan kesempatan yang bisa dimainkan dalam mengkritisi pemerintahan Gus Dur, setelah ini," katanya.

Sama seperti pengusul yang lain, Alvien merasa curiga. Kenapa Megawati emoh mengambil kesempatan untuk menerima pelimpahan Tap Khusus dalam menjalankan tugas teknis pemerintahan. Jangan-jangan, kata Alvien, memang ada faktor X yang tabu untuk dijelaskan PDI-P. Mungkinkah Megawati memang kurang siap untuk mengambil oper tugas-tugas Gus Dur? Atau mungkinkah Mega yang pendiam itu sejatinya punya kelemahan teknis dalam memimpin wilayah politik bangsa yang lebih besar ini? Amanat Kongres Bali sabar dan nrimo. Itulah kata kunci yang mesti diungkap.

Sebab kalau tidak, bisa-bisa frustrasi. Coba ingat, betapa lama putri sulung almarhum 'BK' ini berulang kali gagal menapaki karier politik. Ia lama ditekan Orba, sehingga berulang kali pula gagal meraih kesempatan politik. Gagal menejadi ketua umum definitif PDI versi KLB-PDI Surabaya, dan gagal pula saat berlaga pada SU-MPR 1999 lalu ketika harus mengalah

kepada Mas Dur (KH Abdurrahman Wahid). Padahal, Megawati sebagai satu-satunya calon presiden, adalah amanat Kongres Bali yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka itu, sempat pula para pendukungnya menorehkan darah cap jempol darah, sebagai bukti pembelaan mati-matian terhadap Megawati agar bisa duduk di kursi presiden. Tapi apa yang terjadi? Mega harus tersungkur meski dalam Pemilu tempo hari. Padahal, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu. Jadi, faktor kemampuan yang membuat Megawati kehilangan peluang. Benarkah amanat Kongres Bali hanya bakal menjadi angan-angan belaka? Memang kesempatan belum berakhir. Tapi kalau setiap kesempatan mesti disia-siakan, apa pula arti kesempatan itu? Kata orang bijak, hanya orang yang berani belajar salah yang bakal sempurna dalam pengalaman. Begitu pula dengan Megawati.

Sembari belum berani mengambil pengalaman, mustahil pula punya kematangan untuk mengemban tugas teknis pemerintahan sehari-hari. Menjawab semua keluhan itu, para kader PDI-P di MPR punya logika lain. Menurut mereka, tidak fair kalau penolakan tawaran Tap Khusus buat Mega dalam menjalankan tugas pemerintahan dari Presiden Gus Dur itu sebagai bukti ketidakmampuan Mega dalam memimpin. Ada alasan paling dasar, kenapa Mega berikut PDI-P-nya menolak umpan politik dari fraksi tetangganya itu.

Tapi asumsi-asumsi di atas dibantah keras oleh Ketua Fraksi PDI-P di MPR, Sophan Sophaan, alasan paling pokoknya adalah menghindari konflik sosial antarpemilihan Mega dan Gus Dur. Ia khawatir, betapa hebatnya ketegangan yang timbul di bawah jika Mega mau menerima Tap Khusus, yang seolah-olah isinya merebut kekuasaan Presiden Gus Dur. Padahal, katanya, Gus Dur sebagai pemegang prerogatif presiden tidak menghendaki pelimpahan tugas pemerintahan ke Mega itu dengan landasan Tap Khusus. "Itu alasan pokok, kenapa Ibu Mega menolak," kata Sophan, menjawab OPOSISI.

Putra mantan Dubes Rusia era Soekarno, Manai Sophiaan ini juga menegaskan, tidak benar kalau penolakan umpan politik itu sebagai bukti Megawati tidak mampu menjalankan tugas yang dibebankan Gus Dur. Sebagai kader PDI-P, ia yang paling tahu sejauh mana kemampuan Mega dalam memimpin. Maka itu, kalau toh umpan dari fraksi PPP, PBB, dan Refomasi itu harus ditolak, bukan berarti tidak berani menerima umpan. Tapi semata-mata pertimbangan kerukunan di lapisan bawah. Hindari kudeta. Mengikuti pendapat Sophan adalah Permadi SH. Anggota DPR PDI-P yang juga paranormal politik ini mengatakan, kalau Mega tidak mampu mengemban tugas pemerintahan, tentu tidak mencalonkan diri jadi presiden. Sejak lama, Mega maupun para pendukungnya berjuang keras untuk menggolkan Mega jadi presiden. Termasuk sekarang maupun yang akan datang, para kader PDI-P terus berusaha mencari celah agar Mega kelak jadi orang nomor satu di tanah air. Lalu kenapa peluang ke arah presiden pada Sidang Tahunan MPR tempo hari ditolak? Permadi dengan politis menjelaskan penyebabnya. Menurut peramal yang terkenal dengan ramalan goro-goronya ini, Mega harus menolak kesempatan itu karena beberapa hal. Pertama, langkah ke arah Tap Khusus itu dinilai Permadi lebih bermakna kudeta. Sebab Tap itu didorong dalam rangka mempreteli kekuasaan Gus Dur. "Tidak mungkin Ibu Mega mau melakukan itu," kata penghayat, yang suka busana hitam-hitam ini.

Selain alasan itu, Permadi juga menegaskan kehati-hatian Mega dalam menerima tawaran Gus Dur untuk melakukan tugas teknis pemerintahan. Dalam pandangan Permadi, Mega tahu persis karakter Gus Dur, sehingga tidak akan buru-buru menerima tugas dengan senang hati. Permadi menyindir tabiat Gus Dur yang suka berubah. Misalnya pernyataan Gus Dur ada jenderal provokator, anggota DPR biang kerok, dan isu reshuffle kabinet. Dari semua yang dikatakan Gus Dur itu, menurut Permadi, relatif tidak terbukti. Karena itu, ketika hari ini mengatakan bagi tugas dengan Mega, belum tentu hari berikutnya akan berpendapat sama. Itu artinya, tambah Permadi, Gus Dur tidak konsisten. Dan Mega memang setengah hati menghadapi ketidakkonsistenan Gus Dur itu. Maka itu, kata Permadi, bagi Mega lebih baik membiarkan apa saja maunya Gus Dur.

Kader PDI-P yang lain seperti Dimiyati Hartono, Heri Akhmadi, dan Didi Supriyanto berpendapat yang lain lagi. Menurut Dimiyati, orang boleh saja mengatakan Mega tidak punya kemampuan skil untuk menjadi presiden. Tapi penilaian itu belum final. Sebab perjalanan Mega masih panjang, dan waktulah yang akan membuktikan mana pemimpin yang benar. Ada pemimpin yang pintar tapi tidak jujur. Ada pula pemimpin yang kurang cakap, tapi jujur dan adil. Ikut membela Dimiyati adalah Heri Akhmadi. Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR ini mengatakan, tidak pas kalau Megawati diragukan kemampuannya. Sebab sudah terbukti, Mega mampu mengatasi konflik pelik di partainya sejak lama. Heri menyebut, banyak keberhasilan Mega dalam me-manage konflik kepemimpinan. Banyak kasus mencuat di PDI-P, tapi mampu diatasi Mega dengan sabar dan tenang. Mulai kasus Kongres Medan,

kasus Kudatuli, sampai kasus PDI-P 'indekost'. Semua masalah itu sedapat mungkin diatasi Mega dengan jiwa besar. Kecuali memang ada sejumlah kader yang rewel, sehingga lebih baik ditinggalkan. Didi Suprianto, yang mengaku hadir secara langsung ke rumah Mega dalam konsultasi penolakan Tap Khusus, juga menolak keras pendapat minor tentang kemampuan Mega. Menurut inisiator interpelasi ini, Mega menolak Tap Khusus karena substansinya menabrak UUD '45. Phobia Poros Tengah di tengah kasak-kusuk minor menyangkut kemampuan teknis Mega, ada alibi lain yang dikemukakan para pendukung Mega.

Konon, sebenarnya Mega masih trauma berat dengan manuver politik yang dilakukan kaukus Poros Tengah.

Maka itu, begitu ada tawaran dari PPP, PBB, PAN, dan PK, yang tergabung dalam Poros Tengah, Mega masih tetap belum bisa menerima. Trauma itu begitu mendalam, tatkala Mega dিপেচুদাংগি dalam SU MPR 1999. Menurut kader PDI-P yang enggan disebut namanya, Mega itu sebetulnya punya karakter yang unik. Yaitu, tidak mudah melupakan, sekaligus tidak mudah pula dipengaruhi. Itulah yang berbeda 360 derajat dengan tabiat Gus Dur. Maka itu, ketika kali ini dikasih umpan poros tengah, yang sekaligus tahun lalu menjegalnya, Mega tetap tidak ingin terjebak. Jangan-jangan, kata kader itu, setelah didorong untuk naik menggantikan Gus Dur, nanti di tengah jalan dijatuhkan juga. "Itulah politik, tidak ada yang abadi. Maka itu, Mbak Mega berhati-hati sekali," katanya.

Ia menambahkan, memang tidak semata-mata phobia Poros Tengah yang membuat Mega selalu hati-hati. Secara politis, kalau Mega mau menerima Tap Khusus terhadap pelaksanaan teknis pemeritahan, nanti bisa masuk dua jebakan sekaligus. Pertama, masuk jebakan MPR. Di mana, secara konstitusi setiap Sidang Tahunan MPR, Mega-lah yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tap Khusus itu. Sedangkan yang kedua, masuk jebakan Gus Dur. Meski Gus Dur tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan Mega, Gus Dur tetap bisa berkelit jika pemerintahan yang diemban Megawati gagal total. Karena itu, konon Gus Dur sebetulnya tidak ambil pusing apakah pelimpahan tugas ke Mega itu dilandasi Tap Khusus atau Kepres. Sebab Gus Dur sepertinya sudah tahu, sejauh mana kemampuan Megawati dalam mengemban tugas teknis pemerintahan. Di situlah, sebetulnya Gus Dur tengah menyerang balik Mega dengan jurus termautnya, yaitu ngeles sekaligus menendang lawan. Serangan balik itu kian terasa, ketika Megawati, juga PDI-P menyerang Gus Dur lewat hak interpelasi DPR tempo hari. Tapi yang namanya Gus Dur, memang lihai dengan jurus-jurus politiknya. Mega boleh saja protes atas pencopotan menteri, Laksamana Soekardi. Tapi jangan kaget kalau serangan balik bakal menghunjam dirinya. Benar, apa yang terjadi di majelis pada Sidang Tahunan MPR kali ini. Daripada sekadar meneriaki satu menteri yang dicopot, Gus Dur memberinya sekalian tugas teknis pemerintahan pada Megawati. Tapi apa kata lacur?
(jan/riza/alex)

Copyright © 1999 oposisi.com

Published by Media Selaras Internet Media Management Service



Di-Deadline 3 bulan, Kabinet Bunuh Diri

Bagi orang yang tidak gampang optimis, menyambut kabinet baru rezim pemerintahan Abdurrahman Wahid pasti akan kecewa. Mungkin juga merasa jengkel plus frustrasi. Sebab kabinet yang dibikin Gus Dur ini benar-benar melawan arus. Tidak saja arus politik, tapi juga arus pasar. Kredibilitas personalnya diragukan. Sementara nuansa pengangkatannya berbau koncoisme. Akankah kabinet baru bertahan sampai tiga bulan?

KABINET yang tak bergaransi itu mengundang spekulasi publik. Mereka mengecam dan menilai, reshuffle kali ini tak memperhatikan realitas pasar. Akibatnya, pasar merespon negatif. Begitu susunan kabinet baru diumumkan, nilai rupiah merosot hingga 400 poin. Itu pula yang membuat pelaku bisnis ketar-ketir. Mereka was-was, usia kabinet ini tak akan lama, dan terjadi lagi bongkar pasang kabinet. Jika fenomena itu yang terjadi, setumpuk harapan rakyat akan perbaikan ekonomi, dan keluar dari krisis, cuma isapan jempol. Memang, jawabannya tinggal menunggu hari. Bahkan, menurut pengamat politik Arbi Sanit, masa depan bangsa bersama kabinet baru ini sangat gelap. Tidak ada setitik sinar pun yang bisa menjadi harapan baru. Apa lagi, kalau personal kabinet yang disusun juga tidak lebih baik dari kemampuan kabinet sebelumnya. "Jangan banyak berharaplah. Masa depan ini gelap," kata Arbi pesimis.

Tidak hanya Arbi, yang akhir-akhir ini mendukung sikap Gus Dur itu merasa apatis melihat masa depan kabinet baru. Pengamat sekaliber Eep Syaifullah Fatah juga berpendapat sama. Kata Eep, tidak banyak yang bisa diharapkan dari format kabinet baru. Karena sudah jelas, nuansa penyusunan kabinet baru dilandasi semangat pertemanan. Gus Dur asal mencari orang yang bisa diajak kompromi, alias yes men. Dan bukan mencari menteri yang benar-benar unggul di bidangnya. Itu bisa dilihat dari masuknya orang-orang baru yang menurut ukuran profesionalitas tidak layak diangkat jadi menteri.

Sebut saja Menteri Keuangan Prijadi Prpto Suhardjo, yang terbukti dua kali tidak lolos fit and proper test sebagai Dirut BRI. Tapi lantaran dia dekat presiden, wal hasil diangkat juga jadi menteri keuangan. Padahal, posisi menteri keuangan menjadi taruhan pasar, apakah menteri bersangkutan mampu menjalankan tugas atau tidak.

Juga wajah baru di Menteri Pertahanan, yang diisi Mahfud MD dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Mahfud adalah pengamat hukum tata negara, yang tidak punya latar belakang pertahanan negara. Bahkan, Amien Rais yang sama-sama Muhammadiyah terheran-heran atas pengangkatan Mahfud sebagai menteri pertahanan. Dengan nada kecewa, Amien mengatakan, kualitas Mahfud sangat diragukan, apalagi mampu mengatasi gejolak keamanan negara yang saat ini dialami bangsa Indonesia.

Rupanya, kata Amien, Gus Dur memang tidak tanggap terhadap persoalan yang melilit bangsa ini. Karena itu, cara mengatasi masalah pun tidak bisa tepat. Terbukti, reshuffle kabinet yang diharapkan bisa lebih menjanjikan kinerja pemerintah, di luar dugaan kualitasnya malah lebih buruk. Kalau kabinet sebelumnya yang berkualitas cukup bagus saja tidak mampu membangkitkan perekonomian, apa lagi kabinet sekarang yang kualitasnya lebih jelek. "Gus Dur tidak tanggap keadaan, sehingga menyajikan kabinet yang sangat rapuh," tegas Amien.

Ketua MPR yang sering menjadi rival Gus Dur ini lantas menuding, bahwa kabinet baru hasil reshuffle itu sarat kroni Gus Dur. Pos menteri banyak diisi orang-orang dekat Gus Dur. Dengan pertimbangan kedekatan pribadi. Memang, ujar Amien, presiden punya hak prerogatif memilih menteri. Tapi bukan berarti hak prerogatif itu untuk memilih kroni-kroninya. Dengan kondisi itu, Amien hanya bisa berharap, semoga ada keajaiban dari langit, sehingga terjadi perbaikan ekonomi. Kalau tidak, mustahil segudang persoalan yang melilit bangsa ini bisa diatasi oleh kabinet yang tinggal menunggu hari saja.

Tiga Bulan

Bagi publik, tidak bisa pasrah bungkam terhadap susunan kabinet baru rezim Gus Dur. Kalau kinerjanya tidak lebih baik dari yang kemarin, masyarakat harus melakukan protes ramai-ramai. Sebab, kesempatan reshuffle kali ini merupakan kesempatan terakhir. Tidak

Index Berita

ARSIP

AMAT REDAKSI

Kontak Redaksi
 Pena Building Lt
 1
 Ahmad Yani 88
 baya - Jawa Timur
 Indonesia
 telp: 031-8202101
 fax: 031-8294612
 email:
 oposisi@oposisi.com
 selaras@selaras.com
 Web Site
 /www.oposisi.com/

Tim Oposisi

Amazon.com

Search

boleh lagi Gus Dur bermain-main dengan bongkar pasang kabinet. "Rakyat tidak bisa disandera oleh permainan bongkar pasang kabinet Gus Dur," kata Yahya Zaini dari Golkar. Sebagai partai yang kadernya tidak lagi di kabinet, Golkar harus memberi tenggang waktu berapa lama kabinet baru boleh membuktikan kinerjanya. Menurut Golkar, Gus Dur bersama kabinetnya hanya pantas bereksperimen paling lama 3 bulan, alias 100 hari. Jika sudah mencapai waktu 100 hari, kabinet Gus Dur harus legaawa untuk dievaluasi. Kalau hasilnya jeblak, sudah tidak ada alasan lagi bagi Gus Dur untuk mengelak. Itu artinya, kata Yahya, Gus Dur harus siap berhadapan dengan risiko jabatannya.

Sebab, dominasi kabinet baru sudah diisi orang-orang kepercayaan Gus Dur. Sehingga, tidak boleh lagi Gus Dur menggunakan alasan kegagalan kabinet karena campur tangan partai. Itu artinya, baik-buruknya kabinet sekarang benar-benar menjadi taruhan jatuh tidaknya Gus Dur dari kursi presiden dalam waktu tiga bulan mendatang. Bagi partai-parti yang tidak punya kader di kabinet, akan punya legitimasi lebih besar untuk memberi vonis kinerja kabinet baru.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPR dari PAN, A.M. Fatwa. Menurutnya, tidak boleh lama-lama kabinet baru itu mencoba-coba kemampuannya. Kalau memang kinerjanya sudah tidak menjanjikan, lebih baik disudahi hingga 100 hari saja. Untuk kali ini, katanya, rakyat, DPR, dan MPR harus tegas dalam merespon kinerja kabinet. Sebab sudah bukan saatnya lagi, pemerintah melakukan trial and error atas nasib rakyat. "Selama sepuluh bulan, rakyat sudah dipaksa menerima kenyataan pahit berupa bobroknya ekonomi dan keamanan. Pengangguran semakin menumpuk, sementara biaya hidup bertambah mahal."

Kalau dulu, kata Ali Marwan Hanan, Ketua Fraksi PPP, ibaratnya rakyat lapar dan harus makan pada pukul 12.00. Tapi sekarang, rakyat yang lapar tidak akan sabar lagi menunggu waktu makan hingga pukul 12.00. Tapi sudah harus makan pada pukul 10.00, atau 11.00. Apa yang dikatakan Ali Marwan tersebut sebagai kiasan bahwa rakyat dan DPR sudah tidak lagi menunggu evaluasi Gus Dur hingga Sidang Tahunan Agustus 2001. Tapi bisa jadi di tengah jalan, Gus Dur dievaluasi kembali. "Ya, tepatnya tiga bulan saja, jangan lama-lama" kata Ali Marwan sinis.

Sebetulnya, kata pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Norsy, kalau sekadar melihat kinerja kabinet baru tidak perlu sampai tiga bulan. Dalam waktu seminggu saja, katanya, sudah bisa dilihat sejauh mana kabinet 'penuh protes' ini mampu bekerja. Setidaknya, dalam sidang kabinet pertama nanti, apakah ada formula kerja yang lebih maju atau tidak. Kalau ternyata tidak, pasar secara atraktif akan segera merespon. Hingga sampai 100 hari berikutnya, kalau ternyata juga masih menunjukkan progress yang buruk, pasar akan merespon dengan lebih hebat lagi.

Jangan keburu dikritik, meski menuai banyak protes. Sejumlah kalangan menyarankan supaya kabinet baru ini diberi kesempatan untuk berbuat terlebih dulu. Sebab kalau belum-belum sudah diberi komentar negatif, bisa-bisa respon pasar akan negatif pula. Orang boleh pesimis atas kabinet baru. Tapi tidak fair juga kalau belum ada action yang relevan sudah diteriaki ramai-ramai.

Ini pula yang dikatakan mantan Ketua Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN) Sofjan Wanandi. Menurut dia, sebaiknya susunan kabinet baru tidak langsung dikritik. Sebab kalau langsung dikritik akan membuat pasar kian memburuk.

Sofjan sepakat memberi waktu sampai 3 bulan terlebih dulu untuk menilai kinerja kabinet Gus Dur.

Prijadi Diganti

Sementara, Pramono Anung dari PDI Perjuangan juga berpendapat sama. Menurut Pramono, bagaimanapun kabinet yang terlanjur disusun itu didukung dulu hingga tiga bulan. Baru pascatiga bulan itulah bisa dinilai baik-buruknya kinerja kabinet. Kalau ternyata tidak baik juga, tambah Pramono, ya tinggal tunggu tanggal mainnya. Sebab partai-partai di DPR termasuk PDI Perjuangan dan Golkar akan semakin mengeras untuk mengkritisi pemerintah Gus Dur. Kalau ternyata tidak beres juga mengurus kabinet, bisa jadi ada penilaian lebih keras lagi dari DPR-RI. "Itu tidak perlu menunggu sampai sidang tahunan," kata Pramono. Tidak kalah mencak-mencak karena kabinet Gus Dur dikritik habis-habisan adalah para politisi PKB. Menurut Ketua FKB, Taufikurrahman Saleh, para pengamat maupun politisi jangan gembar-gembor dulu. Sebab, kabinet baru terbentuk. Menurutnya, tidak fair jika kabinet yang baru diumumkan itu diberi deadline 100 hari. Mestinya, setelah lepas 100 hari ada penilaian pada titik-titik mana kelemahannya, dan titik-titik mana kelebihanannya. Bagi menteri yang tak berhasil, wajar-wajar saja diganti yang lain.

Taufik menuturkan, ganti-mengganti kabinet itu sebetulnya hal wajar. Di Indonesia ini, katanya, segala sesuatu dilebih-lebihkan. Sehingga urusan kabinet saja pada ribut. Seolah-olah nasib bangsa ini hanya ditentukan oleh kabinet. Padahal, yang terpenting bagi kelangsungan bangsa ini adalah kepercayaan. Sejauh mana masyarakat bisa percaya pada presiden-nya. Selagi belum, mustahil pula konflik politik bisa diperkecil. Ternyata, faktor Prijadi PS lah yang membikin kepercayaan pasar menurun. Konon, menurut sumber OPOSISI, sebelum kabinet baru itu dilantik, Prijadi ada kemungkinan bakal diganti. "Penggantian tersebut lantaran reaksi yang begitu banyak," ujarnya. Kalau Prijadi benar-benar diganti, semakin transparan inkonsistensi Presiden Gus Dur, tambahannya. ***bejan/abduh

Copyright © 1999 oposisi.com

Published by Media Selaras Internet Media Management Service

